

EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP ORGANISASI PUBLIK

(Studi pada Pemerintah Kabupaten Kebumen)

Oleh:

Teguh Sabaryanto
15/391693/PEK/21139
tsabaryanto@gmail.com

Dosen Pembimbing:

Rusdi Akbar, M.Sc, Ph.D, CMA, Ak, CA

ABSTRAK

Menjadi kewajiban bagi organisasi publik, instansi pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas program dan kegiatannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Dalam rangka menyusun pertanggungjawaban akuntabilitas ini, maka dibentuklah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP terdiri dari empat komponen utama, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan logis dalam setiap komponen SAKIP dan faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas pelaksanaan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan rerangka *Performance Blueprint* untuk menguji hubungan logis dan ketepatan indikator kinerja yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum komponen-komponen SAKIP Kabupaten Kebumen Tahun 2015 belum menunjukkan kesesuaian informasi (hubungan logis). Beberapa kekurangan yang ada, diantaranya adalah ketidakselarasan indikator sasaran. Dalam lingkup SKPD masih terdapat perbedaan indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan. Hasil analisis empat kuadran memberikan gambaran bahwa indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagian besar masih berorientasi pada aspek penyediaan layanan. Efektifitas pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen disebabkan oleh faktor-faktor; Komitmen manajemen yang belum mendukung dalam hal ini adalah faktor kepemimpinan, koordinasi antara staf dan pimpinan serta diantara tim pelaksana SAKIP; Indikator kinerja belum dapat mengukur kinerja karyawan, belum dilaksanakannya *cascading* kinerja pada tiap level; dan Faktor pengetahuan teknis karyawan perlu ditingkatkan

Kata kunci : SAKIP, *Performance Blueprint*, *logic model*, analisis empat kuadran, Isomorfisma Kelembagaan

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah, dalam hal ini pemerintah, untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah, yaitu masyarakat (Mardiasmo,2009). Dalam rangka pelaksanaan asas akuntabilitas, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun secara periodik. Dalam upaya menyusun LAKIP tersebut dibentuklah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta rewiu dan evaluasi kinerja.

Penilaian terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan adanya stagnasi. Hal ini bisa dilihat dari perolehan nilai yang didapat selalu pada level 'CC'. Komponen-komponen yang dievaluasi dalam SAKIP Pemerintah Kabupaten Kebumen masih mendapat nilai yang belum memuaskan.

Secara rinci hasil evaluasi Kemen PAN&RB pada tahun 2016 menyatakan bahwa dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Kebumen belum memberikan

arah yang jelas dalam pencapaian target, indikator kinerja belum relevan, belum spesifik dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pelaksanaan program/ kegiatan hanya sebatas untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan belum berorientasi pada hasil (*outcome*).

Berdasarkan penjelasan diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah keselarasan antar komponen-komponen SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Kebumen?
- b. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi keefektifan implementasi SAKIP Kabupaten Kebumen?

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis keselarasan informasi/ hubungan yang logis dalam setiap komponen SAKIP dan menguji indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keefektifan implementasi SAKIP Kabupaten Kebumen.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2004) menjelaskan terdapat tiga maksud dalam pengukuran kinerja yaitu membantu memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Telah banyak penelitian yang mengkaji tentang SPK terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan/ implementasi SPK. Sofyani dan Akbar (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor-faktor yang berhubungan secara positif dan signifikan terhadap implementasi SPK adalah faktor organisasional, yakni: pelatihan dan respon organisasi yang terbuka terhadap perubahan, dan faktor karakteristik individu. Sementara Syachbrani dan Akbar (2013) menyatakan

bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan SPK yang berorientasi mekanisme insentif pemerintah daerah salah satunya adalah kesulitan menentukan indikator kinerja.

Teori Institusional

Konsep institusional menjelaskan bahwa organisasi dipengaruhi oleh tekanan normatif yang kadang timbul dari lingkungan eksternal maupun dari dalam organisasi itu sendiri. Dalam berbagai kondisi, tekanan eksternal mengarahkan organisasi pada unsur yang dilegitimasi seperti regulasi atau standard operasi. DiMaggio dan Powell (1983) ber teori bahwa organisasi dibentuk oleh kekuatan-kekuatan dari luar organisasi tersebut melalui proses ketaatan, peniruan, dan proses kognisi. Struktur dan proses organisasi cenderung menjadi isomorfis dengan norma-norma yang dapat mereka terima untuk dilaksanakan. Hal tersebut menyebabkan individu-individu dalam organisasi hanya mengandalkan pengalaman mereka untuk meminimalkan masalah dalam rangka menghadapi masalah-masalah baru, sekaligus sebagai usaha untuk bertanggung jawab bagi pihak eksternal.

terdapat tiga mekanisme terjadinya isomorfisma institusional; mekanisme isomorfisma koersif (*coercive isomorphism*), mekanisme isomorfisma mimetik (*mimetic isomorphism*), dan mekanisme isomorfisma normatif (*normative isomorphism*).

Performane Blueprint

Model pengukuran dalam penelitian ini menggunakan model *Performance Blueprint* disingkat PB, yaitu suatu pendekatan terhadap evaluasi dan perencanaan yang lengkap dengan menggunakan Model Logika (*Logic Model*) disingkat LM inovatif dan perluasannya menggunakan empat kuadran Friedman. Model PB dikembangkan oleh Paul J. Longo pada tahun 1998 dalam program bantuan teknis dan riset terapan yang didanai oleh Departemen Tenaga

Kerja dan Layanan Keluarga Ohio (ODJFS) dari Universitas Ohio.

Pendekatan PB mengembangkan pendekatan LM standar dengan melihat siapa saja yang menerima keluaran dalam aktivitas organisasi dan berpartisipasi dalam penyediaan masukan yang menjadi sumber daya organisasi. Selain itu PB juga mengidentifikasi faktor eksternal yang menjadi penghambat tercapainya hasil dan asumsi-asumsi yang dapat membantu pencapaian hasil. Pendekatan PB juga mengkolaborasi pendekatan empat kuadran (Friedman, 2005) untuk mengidentifikasi kualitas indikator kinerja dengan membaginya ke dalam empat bagian, yang dibedakan berdasarkan: upaya (*effort*), hasil (*effect*), kuantitas, dan kualitas.

Friedman (2005) menyatakan bahwa semua sistem akuntabilitas kinerja ditetapkan dengan cara ukuran atau indikator dan kualitas/kuantitas dari upaya dan hasil. Penggabungan dua perspektif tersebut menghasilkan empat kategori, yaitu:

1. Kuantitas upaya (*quantity of effort*) yaitu seberapa banyak pelayanan yang diberikan.
2. Kualitas upaya (*quality of effort*) yaitu seberapa baik pelayanan diberikan.
3. Kuantitas hasil (*quantity of effect*) yaitu seberapa banyak pelanggan menjadi lebih baik.
4. Kualitas hasil (*quality of effect*) yaitu bagaimana pelanggan menjadi lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna permasalahan dari individu atau kelompok masyarakat (Creswell, 2014). Sedangkan studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi,

dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur. Wawancara *purposive sampling* dilakukan terhadap partisipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, yakni dari instansi Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda, serta para perencana dari SKPD terpilih yakni Dinkes, Disnakertransos, dan DPU. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang berkaitan dengan pelaksanaan SAKIP, yakni RPJMD, Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, LAKIP Tahun 2015, dan dokumen lain yang dibutuhkan.

Analisis data hasil wawancara akan dilakukan melalui prosedur mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan Hennink (2012) yang meliputi proses Mempersiapkan Data dan Membangun Kode dan proses Analisis Data Tekstual, yang meliputi Mendeskripsikan data, Membandingkan data, Mengkategorikan Mengkonseptualisasikan data, dan Menjelaskan keseluruhan data/teorisi. Data sekunder dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan PB. LM dalam PB digunakan untuk menguji kesesuaian informasi atau hubungan logis indikator kinerja dalam dokumen perencanaan strategis hingga dokumen laporan kinerja, dan Indikator kinerja akan dianalisis menggunakan model analisis empat kuadran yang diadopsi dari model Friedman. Tahapan analisis data sekunder yang akan dilakukan peneliti adalah:

1. Analisis Indikator dengan PB

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian kesesuaian hubungan pada dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, hingga pelaporan kinerja menggunakan model PB dan

dilanjutkan dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan jawaban apabila terjadi perbedaan interpretasi indikator kinerja.

2. Pembuatan Peta Indikator Kinerja

Indikator kinerja keluaran dan hasil kemudian dianalisa menurut empat kuadran. Hasil analisa indikator kinerja akan didapatkan indikator dalam kelompok upaya dan hasil sehingga dapat diketahui peta indikator yang menunjukkan bagaimana hasil penyusunan indikator kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kebumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Pelaporan

Pengujian keselarasan informasi dalam komponen SAKIP dilakukan menggunakan LM dengan membandingkan indikator kinerja yang terdapat pada masing-masing dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja. Hubungan logis indikator kinerja dalam Perpres 29 Tahun 2014 secara lebih ringkas digambarkan sebagai berikut:



Ketidaksesuaian Sasaran Kinerja Pada Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan

Dari analisis menggunakan LM ditemukan perbedaan sasaran kinerja pada dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.2 sebagai berikut:

Misi	RPJMD	PK	LAKIP
Misi I	8	7	7
Misi II	12	9	9
Misi III	8	5	5
Misi IV	8	5	5

Ketidaksesuaian Indikator Kinerja Pada Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan

Secara lebih rinci terdapat perbedaan jumlah indikator kinerja sebagaimana Tabel

Misi	RPJMD	PK	LAKIP
Misi I	25	30	30
Misi II	59	51	51
Misi III	29	21	21
Misi IV	6	10	10

Ketidakselarasan tersebut dikarenakan adanya penambahan indikator kinerja dalam misi ke satu. Dokumen RPJMD memuat 25 indikator namun dalam dokumen PK dan Lakip bertambah menjadi 30 indikator. Pada Misi II terdapat pengurangan indikator sasaran RPJMD dari 59 menjadi 51 indikator pada PK dan Lakip. Pada Misi III terdapat pengurangan indikator sasaran RPJMD dari 29 menjadi 21 indikator pada PK dan Lakip, dan pada Misi IV ketidakselarasan terjadi karena adanya penambahan indikator dari 6 indikator bertambah menjadi 10 indikator pada PK dan Lakip.

Perbedaan indikator kinerja tersebut secara rinci dapat dijelaskan sbb:

1. Perbedaan Indikator Kinerja antara dokumen RPJMD, PK, dan LAKIP
Yaitu adanya Ketidakselarasan diantara jumlah indikator kinerja RPJMD, PK dan Lakip.
2. Indikator Kinerja pada RPJMD tidak tercantum pada PK dan LAKIP
3. Indikator Kinerja pada PK dan LAKIP tidak tercantum sebagai Indikator Kinerja pada RPJMD

Implementasi SAKIP pada SKPD Keselarasan Indikator Kinerja Renstra SKPD dengan RPJMD

Penelitian dilakukan pada 3 (tiga) SKPD, yaitu Dinkes, Disnakertransos, dan DPU.

1. Dinkes

Menurut dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen, terdapat 2 (dua) sasaran dan 24 (duapuluh empat) indikator sasaran strategis yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinkes. Sedangkan menurut dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Kebumen, terdapat 2 (dua) sasaran dan 28 (duapuluh delapan) indikator sasaran strategis yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinkes.

Setelah diperbandingkan terdapat kesamaan indikator antara Renstra Dinkes dengan RPJMD.

2. Disnakertransos

Menurut dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen, terdapat 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran strategis yang menjadi tugas dan tanggung jawab Disnakertransos. Terdapat satu indikator RPJMD yakni "Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja" yang tidak ditindaklanjuti dengan indikator di Renstra.

3. DPU

Dokumen RPJMD memuat 8 (delapan) indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab DPU.

Keselarasn Indikator Kinerja SAKIP SKPD

Selanjutnya penelitian ini akan melihat lebih jauh mengenai keselarasn informasi antara indikator kinerja yang telah direncanakan SKPD dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja dengan indikator kinerja yang diukur, dievaluasi, dan dilaporkan dalam Lakip SKPD Tahun 2015. Penelitian mengambil data indikator kinerja pada Lakip Dinkes, Disnakertransos, dan DPU. Perbandingan indikator kinerja pada dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Lakip disajikan pada lampiran II.

Identifikasi Indikator Kinerja Kabupaten berdasar pendekatan Empat Kuadran Friedman

Jumlah indikator kinerja yang diidentifikasi sesuai dengan rincian sasaran kinerja yang ingin dicapai. Total indikator kinerja tersebut sebanyak 122 indikator kinerja yang dibagi di setiap pencapaian misi. Hasil identifikasi indikator kinerja dalam empat kolom disajikan secara rinci pada lampiran V Keseluruhan hasil identifikasi indikator kinerja disajikan secara ringkas berdasarkan lima kelompok sebagaimana disajikan pada Tabel 4.11

Identifikasi Indikator Kinerja Berdasar Analisis Empat Kuadran

Indikator Kinerja per Kelompok Misi	Upaya		Hasil	
	Kuan	Kual	Kuan	Kual
Misi I	10	16	2	0
Misi II	6	33	9	12
Misi III	6	5	10	7
Misi IV	1	1	2	2
Jumlah	23	55	23	21

Pembahasan/Diskusi

Analisis Kesesuaian Informasi SAKIP

Berdasarkan hasil temuan investigasi kasus mengenai kesesuaian informasi logis dalam SAKIP Kabupaten Kebumen, ditemukan ketidaksesuaian informasi, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Ringkasan Permasalahan Indikator Kinerja Hasil Analisis Dokumen Kinerja

Kelompok Masalah	Permasalahan	Dokumen Penelitian	Ket.
Ketidak-sesuaian sasaran kinerja pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Pengurangan sasaran kinerja	RPJMD, PK, LAKIP	Misi I pada PK dan LAKIP Berkurang satu sasaran, Misi II, III, dan IV berkurang

			tiga sasaran
Ketidak-sesuaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Pengurangan indikator kinerja	RPJMD, PK, LAKIP	Misi I pada PK dan LAKIP berkurang 5 indikator, Misi II dan III berkurang 8 indikator kinerja
	Penambahan indikator kinerja	RPJMD, PK, LAKIP	Misi IV pada PK dan LAKIP bertambah 4 indikator

Berdasar hasil wawancara, disimpulkan bahwa Bappeda sebagai institusi perencana, dan Bagian Organisasi sebagai institusi pembuat laporan kinerja, mengakui adanya ketidakselarasan yang disebabkan oleh belum diterapkannya regulasi perencanaan, dan tidak adanya koordinasi diantara SKPD yang memiliki indikator sejenis.

Analisis Kesesuaian Informasi SAKIP SKPD

Berdasarkan hasil temuan investigasi kasus mengenai kesesuaian informasi logis dalam implementasi SAKIP oleh Dinkes, Disnakertransos, dan DPU, ditampilkan pada Tabel berikut

Ringkasan Kesesuaian Informasi SAKIP Hasil Analisis Dokumen Kinerja

Kesesuaian Informasi	Dinkes	Disnakertransos	DPU
Indikator kinerja Pemerintah/RPJMD dibandingkan dengan Renstra SKPD	selaras	beberapa tidak selaras	beberapa tidak selaras
Indikator Kinerja Renstra SKPD dibandingkan PK SKPD	selaras	selaras	selaras
Target Indikator Kinerja dalam PK SKPD dibandingkan LAKIP SKPD	Beberapa tidak selaras	selaras	beberapa tidak selaras

Berdasar Tabel 4.13 tersebut maka indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD, pada SKPD Dinkes telah cukup selaras, Disnakertransos beberapa tidak selaras yakni indikator “Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja” pada RPJMD tidak tercantum indikator yang sejenis pada Renstra SKPD, begitu pula dengan DPU pada beberapa aspek kurang selaras, contoh adalah indikator “Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan” pada RPJMD tidak selaras dengan indikator “Terbayarnya rekening listrik LPJU se Kabupaten”.

Keselarasan indikator RPJMD

dengan indikator Renstra SKPD seharusnya dapat terjalin karena, pada awal penyusunan RPJMD, SKPD turut menyumbangkan indikator kerjanya yang sekiranya sejalan untuk mewujudkan visi misi Bupati, dengan demikian setiap indikator yang ada dalam RPJMD semestinya akan selaras dan terbagi habis menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD.

Renstra SKPD kemudian digunakan sebagai pedoman pelaksanaan SAKIP dalam lingkup SKPD tersebut. Indikator kinerja yang termuat dalam dokumen Renstra SKPD seharusnya sama dengan indikator yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja maupun yang dilaporkan dalam LAKIP. Berdasar Tabel 4.12, penyajian LAKIP pada Dinkes, dan Disnakertransos telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Renstra masing-masing SKPD tersebut

Selain melihat kesesuaian informasi antara dokumen rencana strategis dengan dokumen perencanaan tahunan dan dokumen pelaporan, penelitian ini juga melihat konsistensi informasi target kinerja yang akan dicapai. Perbandingan target indikator kinerja antara dokumen Perjanjian Kinerja dengan LAKIP Dinkes terdapat ketidakselarasan target yakni pada indikator “Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)” dimana target pada Perjanjian Kinerja sebesar 70,45 tahun tidak sama dengan target pada

LAKIP yakni 70,8 Tahun. Disamping itu juga pada indikator “Menurunnya Angka Kematian bayi (AKB)” terjadi perbedaan target 9/1000 KH pada Perjanjian Kinerja dan 5/1000 KH pada LAKIP. Begitu juga dengan indikator “Cakupan kunjungan bayi” target pada PK 84 % sedangkan LAKIP 91%.

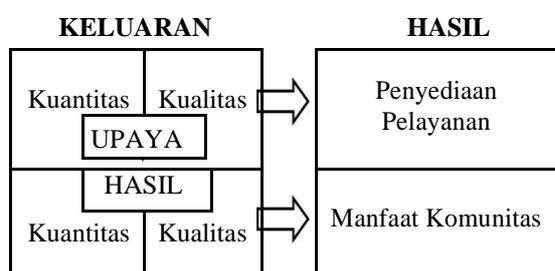
Analisis data dalam lampiran II tersebut menunjukkan bahwa kecuali Dinkes, indikator kinerja pada Disnakertransos dan DPU, pada beberapa aspek, belum menunjukkan kesamaan informasi pada dokumen Perjanjian Kinerja dan Lakip. Pada Dinkes terdapat keselarasan indikator antara Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Lakip, cenderung lebih baik secara substansi maupun redaksional. Hal ini disebabkan dinas ini telah memiliki indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku secara nasional. Sementara keselarasan indikator kinerja pada PK dan LAKIP pada Disnakertransos sudah menunjukkan adanya keselarasan.

Ketidakselarasan indikator kinerja pada DPU yakni pada perbedaan pada target kinerja antara Perjanjian Kinerja dan LAKIP pada beberapa indikator. Berkaitan dengan hal ini, Kasubag Perencanaan DPU mengemukakan bahwa ketidakselarasan Perjanjian Kinerja dengan LAKIP DPU karena tidak adanya kesamaan dalam menentukan satuan.

Analisis Indikator Pengukuran Kinerja

Analisis PB dimulai dengan mengidentifikasi indikator kinerja output dalam aspek upaya dan hasil, selanjutnya membuat peta indikator kinerja dengan menggunakan analisis empat kuadran yang dikembangkan oleh Friedman. Analisis empat kuadran ini mengidentifikasi aspek upaya dan hasil dengan mengkaitkannya pada aspek penyediaan layanan (*service-delivery outcome*) dan manfaat layanan pada masyarakat yang dituju (*community outcomes*). Target indikator kinerja juga berperan penting dalam identifikasi, yaitu dengan melihat satuannya, apakah dalam kuantitas, berupa: jumlah layanan, jumlah

aktivitas, atau jumlah manfaat yang diterima oleh masyarakat atau dalam kualitas, berupa: persentase layanan yang baik, rasio capaian aktivitas, persentase kepuasan pelanggan. Setelah itu, hasil pemetaan indikator kinerja dimasukkan ke dalam tabel analisis empat kuadran untuk menghasilkan peta indikator kinerja. Setelah dilakukan analisis empat kuadran, selanjutnya bisa ditarik hubungan antara indikator kinerja keluaran untuk mencapai hasil sebagaimana konsep OPM&M, ditunjukkan pada gambar 4.2 dibawah ini.



Gambar 4.2 Hubungan Keluaran dan Hasil
Sumber: Longo (2002)

Setelah dilakukan analisis indikator kinerja, maka dapat digambarkan peta indikator kinerja yang menggambarkan kualitas indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

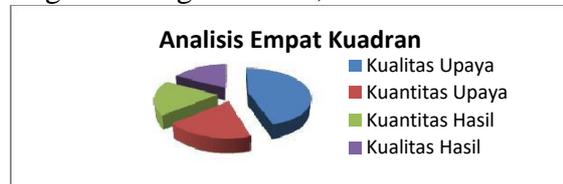
	Kuantitas	Kualitas
Upaya	23	55
Hasil	23	21

Gambar 4.3 Peta Indikator Kinerja Kabupaten Kebumen
Sumber: diolah dari analisis Empat Kuadran

Berdasarkan peta indikator kinerja pada Gambar tersebut tampak bahwa sebagian besar indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen berbasis pada kualitas upaya, yaitu berapa persen pelayanan diberikan dengan baik, meliputi aspek efisiensi dan keadilan. Untuk lebih jelasnya akan diurutkan sesuai dengan prioritas penyusunan indikator kinerja yang baik menurut analisis Empat Kuadran sebagai berikut:

1. Kualitas upaya : 55
2. Kuantitas hasil : 23
3. Kuantitas upaya : 23
4. Kualitas hasil : 21

Hasil ini dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut;



Gambar 4.4 Diagram Hasil Analisis Empat Kuadran, Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen

Jika dilihat dari pemetaan indikator tersebut, jumlah indikator “kualitas upaya” menjadi yang terbesar disusul indikator dengan kategori “kuantitas upaya dan kuantitas hasil”, dan terbawah adalah indikator “kualitas hasil”. Berdasarkan gambaran diatas menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen masih berfokus pada kualitas dan jumlah pelayanan dan belum berfokus pada perbaikan kondisi masyarakat.

Untuk lebih jelasnya ditampilkan contoh indikator kinerja yang mencerminkan setiap jenis kategori pada analisis Empat Kuadran sebagai berikut:

1. Kuantitas Upaya :
 - a) Jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN
 - b) Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK
 - c) Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
2. Kualitas Upaya :
 - a) Persentase jumlah aparat yang mengikuti diklat
 - b) Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin pegawai
 - c) Persentase cakupan pelayanan Jamkesda
3. Kuantitas Hasil :
 - a) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung
 - b) Meningkatnya kesehatan ibu/angka kematian ibu melahirkan
 - c) Berkurangnya angka kematian balita
4. Kualitas Hasil :
 - a) Angka partisipasi kasar laki-laki
 - b) Persentase guru layak mengajar SD/MI
 - c) Persentase kelulusan

Kondisi indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen tersebut, jika dihubungkan dengan pencapaian hasil menurut model PB, akan menunjukkan indikator kinerja pada dua bagian utama, yaitu:

1. Indikator kinerja berbasis penyediaan pelayanan
2. Indikator kinerja berbasis manfaat komunitas

Berdasarkan analisis PB, 61% indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen masih berbasis pada penyediaan layanan, sementara 39% sisanya berbasis manfaat komunitas.

Analisis Hasil Wawancara

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara dengan partisipan yang berasal dari instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen. Partisipan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap implementasi SAKIP, yaitu:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Kebumen
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Kebumen
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen,
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen
6. Kasubag Ketatalaksanaan, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen

Analisis data hasil wawancara akan dilakukan melalui prosedur mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan Hennink (2012) yang meliputi proses Mempersiapkan Data dan Membangun Kode dan proses Analisis Data Tekstual. Langkah-langkah tersebut dijelaskan sbb:

Langkah-langkah analisis Hasil Wawancara (Hennink,2012)

1. Mempersiapkan Data dan Membangun Kode; yakni dengan Membuat transkripsi verbal, menerjemahkan

transkrip, jika diperlukan, dan membuang data identitas partisipan dalam rangka anonimitas data; serta Menemukan kode-kode, yakni topik-topik inti yang didiskusikan oleh partisipan dan diidentifikasi melalui pembacaan data

2. Analisis Data Tekstual, meliputi;

- Mendeskripsikan Data yakni Membuat deskripsi tebal (*thick description*) yaitu suatu deskripsi yang tidak hanya menggambarkan perilaku tetapi juga konteks dari setiap masalah untuk membangun penjelasan rinci tentang aspek yang berbeda dari setiap masalah dan masing-masing topik atau isu;
- Membandingkan Data yakni Mengidentifikasi pola dan mencatat pengelompokan-penge-lompokan data, membanding-kannya dalam sub-kelompok deduktif yakni membandingkan kode-kode dalam subkelompok yang dibangun oleh peneliti, dan perbandingan dalam sub-kelompokinduktifyaitu perbandingan kode-kode yang dibangun dan muncul dari data itu sendiri;
- MengkategorikandanMeng-konseptualisasikan Data yakni Mengelompokkan kode dengan atribut yang sama ke dalam kategori sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman data yang lebih konseptual tentang apa yang terjadi; dan terakhir adalah
- Menjelaskan Keseluruhan Data yakni Data dikategorisasikan dan dikonseptualisasikan ditarik penjelasan dari keseluruhan data yang terbangun.

Tahap Mempersiapkan Data dan Membangun Kode

Prosedur yang dilakukan pada tahapan ini adalah menyusun transkripsi wawancara, dan membacanya secara keseluruhan sehingga dapat disusun kode-kode.

Penarikan kode dilakukan secara berulang dengan verifikasi *membercheck* sehingga

didapati kode akhir yang digunakan. Dari transkrip yang dibuat, didapat 27 kode/topik yang berbeda dan juga terdapat topik sejenis yang mengarah pada jawaban penelitian.

Mendeskripsikan Data

Kode dideskripsikan untuk agar tersusun rincian yang detail dari setiap topik/kode sehingga dapat dipahami bagaimana tiap topik saling terkait dan dapat menangkap nuansa dari tiap topik tersebut berdasarkan pandangan partisipan, dan menggambarkan konteks dari setiap masalah. Didapat 6 kode/topik yang sama dan dibuatlah deskripsi dari topik-topik tersebut menurut pandangan partisipan.

Membandingkan Data

Membandingkan kode/topik yang sama yang didiskusikan oleh partisipan yang berbeda dengan tujuan untuk mengeksplorasi data lebih lanjut, mengidentifikasi pola, dan mencatat kelompok-kelompok data. Didapat 6 kode/topik sama yang diperbandingkan dengan pendapat partisipan berdasarkan kategori partisipan dimuka yakni kategori perencana, penyusun, dan evaluator SAKIP. Didapat beberapa topik dipahami sebagai hal yang sama namun beberapa topik bisa dipahami sebagai hal yang berbeda. Misalnya topik koordinasi, terdapat perbedaan pandangan antara P1 sebagai perencana dan P3 sebagai penyusun. Topik Formalitas dipahami sebagai hal yang sama bagi seluruh partisipan. Didapat 5 kode dipahami secara berbeda.

Mengkategorikan dan Mengkonseptualisasikan Data

mengkategorikan kode yakni mengelompokkan kode dengan atribut yang sejenis dalam kategori yang luas. agar didapatkan pemahaman data secara konseptual. Didapat 2 Kode kategori yang kemudian ditarik rerangka konsep untuk menjelaskan dan membangun teori yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian

Kategorisasi dan Konseptualisasi Data

Kode	Kategorisasi	Konseptualisasi
Koordinasi	Komitmen manajemen	Isomorfisme Institusional
Kepemimpinan		
Indikator Kinerja		
Formalitas	Pengetahuan Teknis	
Sumberdaya Manusia		

Menjelaskan Keseluruhan Data /Teorisasi

Prosedur selanjutnya dari proses analisis data adalah membawa keseluruhan analisis komponen-komponen sebelumnya untuk membangun sebuah teori. Dibangun teorisasi yang merupakan penjelasan dari keseluruhan data empiris yang terbangun dari tahap-tahap sebelumnya yang menjawab pertanyaan penelitian ke-2.

Berdasarkan hal diatas maka disusun penjelasan dari keseluruhan data empiris yang terbangun dari tahap-tahap sebelumnya sbb:

“Isomorfisme institusional berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Kebumen”

Fenomena Isomorfisma Institusional

Berdasarkan kode-kode yang muncul dalam wawancara, dapat dianalisis penjelasan adanya isomorfisma dalam Pemerintah Kabupaten Kebumen sbb;

1. Isomorfisma Koersif

Isomorfisma koersif muncul dengan kode Formalitas. Dari wawancara didapat data bahwa penyusunan LAKIP hanya sebatas formalitas untuk memenuhi kewajiban dikarenakan aturannya memang mewajibkan untuk menyusun laporan tersebut. Kode ini muncul hampir pada seluruh partisipan (P1-P6). Setelah dideskripsikan lebih dalam, kode ini berkaitan dengan kode kepemimpinan. Pemimpin ikut mengesahkan adanya laporan yang hanya bersifat formalitas saja ini, sementara dalam hal ini di Kabupaten Kebumen, tidak ada usaha dari pimpinan untuk membuat kebijakan yang dapat meminimalisir praktek ini, misalnya dengan perbaikan kinerja bawahannya (lihat transkrip wawancara P3).

2. Isomorfisma Mimetik
Isomorfisma Mimetik yang terjadi pada perilaku di Pemerintah Kabupaten Kebumen mewujud dalam kegiatan studi banding seperti muncul dalam transkripsi Partisipan 3 (P3) yang menyatakan bahwa demi perbaikan pelaksanaan SAKIP Kabupaten Kebumen, instansi tersebut sebagai penanggungjawab penyusunan melakukan studi banding ke daerah lain (Kabupaten Banyuwangi) yang memperoleh nilai lebih baik (lihat transkripsi P3). Studi banding ini merupakan hal yang lumrah dalam perilaku birokrasi, namun pengaruh bagi perbaikan kinerja yang lebih baik, masih perlu diteliti lebih lanjut.
3. Isomorfisma Normatif Pelatihan-pelatihan banyak diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, biasanya melibatkan unsur akademisi, seperti dinyatakan oleh P3 dan P4. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan penyusunan RPJMD bagi para perencana, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dengan asumsi bahwa dengan diadakannya pelatihan tersebut akan berpengaruh pada perbaikan kinerja dan hasil kinerja yang lebih baik. Dorongan dan motivasi ini merupakan bentuk Isomorfisma Normatif. Pelatihan-pelatihan tersebut ternyata belum dapat memperbaiki efektifitas pelaksanaan SAKIP (transkripsi P4). Faktor mutasi pegawai menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini dikarenakan pegawai yang telah dilatih pada akhirnya dipindah ke bagian yang belum tentu menangani pelaksanaan SAKIP, dan pegawai yang menggantikan belum tentu lebih baik dari pegawai yang digantikan.

SIMPULAN

Hasil analisis dan diskusi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan evaluasi, secara umum komponen-komponen SAKIP Kabupaten Kebumen Tahun 2015

belum menunjukkan kesesuaian informasi (hubungan logis). Beberapa kekurangan yang ada, diantaranya adalah ketidakselarasan indikator sasaran. Dalam lingkup SKPD masih terdapat perbedaan indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan. Hasil analisis empat kuadran memberikan gambaran bahwa indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagian besar masih berorientasi pada aspek penyediaan layanan.

2. Efektifitas pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:
 - a. Komitmen manajemen yang belum mendukung dalam hal ini adalah faktor kepemimpinan, koordinasi antara staf dan pimpinan serta diantara tim pelaksana SAKIP ;
 - b. Indikator kinerja belum dapat mengukur kinerja karyawan, belum dilaksanakannya *cascading* kinerja pada tiap level ;
 - c. Faktor pengetahuan teknis karyawan perlu ditingkatkan.

Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dipengaruhi oleh isomorfisma institusional yakni isomorfisma koersif, dimana tekanan dari peraturan perundangan yang mewajibkan setiap instansi baik di tingkat SKPD maupun kabupaten untuk menyusun LAKIP. Selain isomorfisma koersif, pelaksanaan SAKIP juga dipengaruhi oleh isomorfisma normatif, dan isomorfisma mimetik. Normatif dibuktikan dengan adanya komitmen para pejabat pelaksana SAKIP untuk lebih meningkatkan sasaran dan target kinerjanya, sementara fenomena mimetik mengacu pada diadakannya *benchmarking* untuk meningkatkan kinerja.

KETERBATASAN

1. Penelitian ini hanya dilakukan atas dokumen Renstra 2010-2015, PK, dan LAKIP untuk periode tahun 2015,

hanya menilai keselarasan antar dokumen perencanaan/pelaporan kinerja serta tidak sampai pada pengukuran dan evaluasi atas capaian kinerja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

2. Penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan karakteristiknya yang membuat hasil penelitian ini tidak bisa di generalisasi secara umum untuk pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia, walaupun memiliki hasil evaluasi yang sama dari penilaian Kementerian PAN&RB.

IMPLIKASI

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya perubahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen agar pelaksanaan Sakip menjadi efektif, yakni:

- a) Komitmen Pemimpin untuk mendukung pelaksanaan Sakip
- b) Pola pikir segenap komponen aparatur pada Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap penilaian kinerja yang berbasis *outcome*
- c) Sinergisme diantara perencana dan pelaksana Sakip, sehingga menghasilkan kinerja yang berbasis manfaat komunitas
- d) Kualitas SDM yang dapat mendukung kebijakan pimpinan dengan lebih efektif dengan melaksanakan kinerja yang berkualitas bukan semata formalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Rusdi, Robyn Pilcher, and Brian Perrin. 2012. *Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government*. Pacific Accounting Review, Vol. 24 Iss: 3 pp. 262-291

Akbar, Rusdi, Robyn Pilcher, and Brian Perrin. 2015. *Implementing Performance Measurement Systems*". Qualitative Research in Accounting & Management, Vol. 12 Iss: 1 pp. 3-33

Akbar, Rusdi, Robyn Pilcher, and Brian Perrin, 2015. *Implementing Performance Measurement Systems: Indonesian Local Government Under Pressure*. Qual. Res. Account. Manag. 3–33. doi:10.1108/GRAM-03-2013-0013

Ahyaruddin, M., dan Akbar, R., 2016, *The Relationship Between The Use Of A Performance Measurement System, Organizational Factors, Accountability, And The Performance Of Public Sector Organizations*, Journal of Indonesian Economy and Business Volume 31, Number 1, 2016, 1 –22

Arnaboldi, Michela dan Giovanni Azzone. 2010. *Constructing Performance Measurement in The Public Sector*. Critical Perspectives on Accounting 21, pp. 266-282.

Asmoko, H., 2014. *Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Pusat Di Indonesia*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

Basri, K., dan Nabiha, A.K.S., 2014. *Accountability Of Local Government: The Case Of Aceh Province, Indonesia*. Asia Pacific Journal of Accounting and Finance. Volume 3 (1), December 2014

Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.

Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. SAGE Publications, Inc, California.

Friedman. 2005. *Trying Hard Is Not Good Enough: How to Produce Measureable Improvements for Customers and Communities*, FPSI Publishing.

Fahmi, Irfan. 2010. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Gavrea, C., et.al.,2011. *Determinants Of Organizational Performance: The Case Of Romania*. Management & Marketing Challenges for the

- Knowledge Society (2011) Vol. 6, No. 2, pp. 285-300
- Gudono. 2014. *Teori Organisasi*. Edisi tiga. BPFE, Yogyakarta
- Hatry, Harry P. *Performance Measurement Getting Results*. The Urban Institute Press, Washington D.C.
- Hennink, Monique, Inge Hutter, Ajay Bailey, 2012. *Qualitative Research Methods*. SAGE Publications, Ltd, London
- Jurnali, T., Nabihah, A.K.S., 2015. *Performance Management System for Local Government: The Indonesian Experience*. Glob. Bus. Rev. 16, 351–363. doi:10.1177/0972150915569923
- Kloot, L., 2008. *Performance measurement and accountability in an Australian fire service*. International Journal of Public Sector Management Vol. 22 No. 2, 2009 pp. 128-145
- LAN, BPKP, 2000. Akuntabilitas dan Good Governance.
- Longo, P.J., 2002. *The Performance Blueprint: An Integrated Logic Model Developed To Enhance Performance Measurement Literacy: The Case of Performance-Based Contract Management*.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Matthews, Joseph R., 2011. *Assesing Organizational Effectiveness: The Role of Performance Measures*. Library Quarterly Vol. 81 No. 1, The University of Chicago.
- Pastuszkovadan Palka. 2011. *Performance Management in The Sphere of Public Administration*. Annuals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, Volume 22 No. 1, Published by DAAAM International, Vienna, Austria.
- Poister, Theodore H. 2003. *Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations*. Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, CA.
- Primarisanti, H., dan Akbar, R., 2015, *Factors Influencing The Success Of Performance Measurement: Evidence From Local Government*, Journal of Indonesian Economy and Business Volume 30, Number 1, 2015, 56 – 71
- Puspitasari, I., 2015. *Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sleman)*. Unpublished Thesis S2. Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Republik Indonesia, 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, 2007. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Syachbrani, W., dan Akbar, R., 2013, *Faktor-Faktor Teknis dan Keorganisasian yang Memengaruhi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan (2013), ISSN: 2088-0685 Vol.3 No. 2, Oktober 2013 Pp 447-464
- Sofyani, Hafiez, dan Rusdi Akbar. 2013. *Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 10 Nomor 2, pp. 184-205.
- Wibawa, Samodra, *New Public Management sebagai Model Administrasi Kabupaten*, (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2002)
- Yamamoto, H., *New Public Management: Japan's Practice*, (Japan: Institute for International Policy Studies, 2003) p.1.

LAMPIRAN

Lampiran 1

**IDENTIFIKASI KESELARASAN
INDIKATOR KINERJA RPJMD, PERJANJIAN KINERJA, DAN LAKIP
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
	RPJMD 2010-2015	PERJANJIAN KINERJA 2015	LAKIP 2015	
A. MISI KESATU 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Tingkat Pendidikan Aparat : SMA; D3; S1 dan S2 Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai Persentase Aparat yang mendapatkan penghargaan 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Tingkat Pendidikan Aparat : SMA; D3; S1 dan S2 Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Tingkat Pendidikan Aparat : SMA; D3; S1 dan S2 Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai 	Terdapat perbedaan jumlah indikator RPJMD : 4 PK/LAKIP : 3 Indikator sama : 3 Indikator berbeda : 1 Perbedaan Indikator pada RPJMD
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase SKPD yang menyusun SAKIP Persentase SKPD dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik Kesesuaian kapasitas SDM dengan kapasitas jabatan 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase SKPD yang menyusun SAKIP Persentase SKPD dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase SKPD yang menyusun SAKIP Persentase SKPD dengan Predikat Akuntabilitas Terbaik 	Terdapat perbedaan jumlah indikator RPJMD : 3 PK/LAKIP : 2 Indikator sama : 2 Indikator berbeda : 1 Perbedaan Indikator pada RPJMD
3. Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi kebijakan publik	<ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN 	<ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN 	<ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang KIP Ketersediaan data dan Informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN 	Tidak terdapat perbedaan indikator
4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS) Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan NIK) Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemkab Kebumen Meningkatnya Tertib Administrasi 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS) Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan NIK) Cakupan penerbitan Kartu Keluarga Cakupan penerbitan Kartu Tanda 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS) Tertib Administrasi Kependudukan (diberlakukan NIK) Cakupan penerbitan Kartu Keluarga Cakupan penerbitan Kartu Tanda 	Terdapat perbedaan jumlah indikator RPJMD : 7 PK/LAKIP : 9 Indikator sama : 6 Indikator berbeda : 4 Perbedaan Indikator pada RPJMD dan PK/LAKIP

Lampiran 1

**IDENTIFIKASI KESELARASAN
INDIKATOR KINERJA RPJMD, PERJANJIAN KINERJA, DAN LAKIP
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
	RPJMD 2010-2015	PERJANJIAN KINERJA 2015	LAKIP 2015	
	Pemerintahan Desa 6. Meningkatnya persentase desa berkembang 7. Diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan/Badan Layanan Umum Daerah	Penduduk 6. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 7. Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemkab Kebumen 8. Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 9. Meningkatnya persentase desa berkembang	Penduduk 6. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 7. Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemkab Kebumen 8. Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa 9. Meningkatnya persentase desa berkembang	
5. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1. Persentase kenaikan PAD 2. Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	1. Persentase kenaikan PAD 2. Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	1. Persentase kenaikan PAD 2. Persentase Tertib Administrasi Keuangan Daerah	Tidak terdapat perbedaan indikator
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA Langsung 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA Langsung 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADA Langsung 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PILKADES	Tidak terdapat perbedaan indikator
7. Meningkatnya sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan	1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan 2. Akurasi dan kontinuitas data jangka menengah dan tahunan	Tidak muncul	Tidak muncul	Indikator dalam RPJMD tidak muncul dalam PK/LAKIP
8. Meningkatnya kesiapan Pemkab dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dengan segala dampaknya	1. Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam	1. Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam 2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran 3. Tingkat waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) 4. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 5. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK 6. Cakupan penegakan peraturan daerah da peraturan kepala daerah di kabupaten 7. Cakupan patroli siaga ketertiban umum	1. Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam 2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran 3. Tingkat waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) 4. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 5. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK 6. Cakupan penegakan peraturan daerah da peraturan kepala daerah di kabupaten 7. Cakupan patroli siaga ketertiban umum	Terdapat perbedaan jumlah indikator RPJMD : 1 PK/LAKIP : 8 Indikator sama : 1 Indikator berbeda : 7 Perbedaan Indikator pada PK/LAKIP

**IDENTIFIKASI KESELARASAN
INDIKATOR KINERJA RPJMD, PERJANJIAN KINERJA, DAN LAKIP
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
	RPJMD 2010-2015	PERJANJIAN KINERJA 2015	LAKIP 2015	
		dan ketentraman masyarakat 8. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	dan ketentraman masyarakat 8. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	
JUMLAH INDIKATOR MISI I	25 INDIKATOR	30 INDIKATOR	30 INDIKATOR	Total 85 indikator 71 indikator sama 14 indikator berbeda
B. MISI KEDUA 1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup 2. Mengurangi Tingkat Kematian Anak 3. Mengurangi Angka Kematian Balita 4. Meningkatkan Kesehatan Ibu/ Angka Kematian Ibu Melahirkan 5. Penanganan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya 6. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 7. Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani 8. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 9. Cakupan Pelayan Ibu Nifas 10. Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani 11. Cakupan Kunjungan Bayi 12. Cakupan Desa/Kelurahan UCI 13. Cakupan Pelayanan Anak Balita 14. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Usia-6-24 bulan bagi Keluarga Miskin 15. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 16. Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa SD 17. Cakupan Peserta KB Aktif 18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	1. Usia Harapan Hidup 2. Mengurangi Tingkat Kematian Bayi 3. Mengurangi Angka Kematian Balita 4. Meningkatkan Kesehatan Ibu/ Angka Kematian Ibu Melahirkan 5. Penanganan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya 6. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 7. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 8. Cakupan Pelayan Ibu Nifas 9. Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani 10. Cakupan Kunjungan Bayi 11. Cakupan Desa/Kelurahan UCI 12. Cakupan Pelayanan Anak Balita 13. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Usia-6-24 bulan bagi Keluarga Miskin 14. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 15. Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa SD 16. Cakupan Peserta KB Aktif 17. Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need)	1. Usia Harapan Hidup 2. Mengurangi Tingkat Kematian Bayi 3. Mengurangi Angka Kematian Balita 4. Meningkatkan Kesehatan Ibu/ Angka Kematian Ibu Melahirkan 5. Penanganan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya 6. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 7. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 8. Cakupan Pelayan Ibu Nifas 9. Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani 10. Cakupan Kunjungan Bayi 11. Cakupan Desa/Kelurahan UCI 12. Cakupan Pelayanan Anak Balita 13. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Usia-6-24 bulan bagi Keluarga Miskin 14. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 15. Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa SD 16. Cakupan Peserta KB Aktif 17. Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need)	Terdapat perbedaan jumlah indikator RPJMD : 23 PK/LAKIP : 25 Indikator sama : 22 Indikator berbeda : 4 Perbedaan Indikator pada RPJMD dan PK/LAKIP

Lampiran 1

**IDENTIFIKASI KESELARASAN
INDIKATOR KINERJA RPJMD, PERJANJIAN KINERJA, DAN LAKIP
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
	RPJMD 2010-2015	PERJANJIAN KINERJA 2015	LAKIP 2015	
	a) Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun b) Penemuan penderita Pneumonia Balita c) Penemuan pasien baru TB BTA Positif d) Penderita DBD yang ditangani e) Penemuan penderita diare 19. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 20. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin 21. Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan 22. Cakupan Desa/Kel mengali KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam 23. Cakupan Desa Siaga Aktif	18. Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun 19. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 20. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit a) Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun b) Penemuan penderita Pneumonia Balita c) Penemuan pasien baru TB BTA Positif d) Penderita DBD yang ditangani e) Penemuan penderita diare 21. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 22. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin 23. Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan 24. Cakupan Desa/Kel mengali KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam 25. Cakupan Desa Siaga Aktif	18. Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun 19. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 20. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit a) Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun b) Penemuan penderita Pneumonia Balita c) Penemuan pasien baru TB BTA Positif d) Penderita DBD yang ditangani e) Penemuan penderita diare 21. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 22. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin 23. Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan 24. Cakupan Desa/Kel mengali KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam 25. Cakupan Desa Siaga Aktif	
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat miskin secara bertahap	1. Persentase Cakupan Pelayanan Jamkesda	1. Persentase Cakupan Pelayanan Jamkesda 2. Cakupan KK miskin peserta Jamkesmas/Jamkesda 3. Pembangunan gedung RSUD tipe B Kabupaten Kebumen	1. Persentase Cakupan Pelayanan Jamkesda 2. Cakupan KK miskin peserta Jamkesmas/Jamkesda 3. Pembangunan gedung RSUD tipe B Kabupaten Kebumen	Terdapat perbedaan jumlah indikator RPJMD : 1 PK/LAKIP : 3 Indikator sama : 1 Indikator berbeda : 2 Perbedaan Indikator pada PK/LAKIP
3. Terlaksananya Pendidikan Untuk Semua	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-Laki 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-Laki	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-Laki	Terdapat perbedaan jumlah indikator RPJMD : 6

Lampiran 1

**IDENTIFIKASI KESELARASAN
INDIKATOR KINERJA RPJMD, PERJANJIAN KINERJA, DAN LAKIP
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
	RPJMD 2010-2015	PERJANJIAN KINERJA 2015	LAKIP 2015	
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-Laki 4. Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan 5. Angka Melek Huruf 6. Rata-Rata Lama Sekolah	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan 3. Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-Laki 4. Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan 5. Angka Melek Huruf 6. Rata-Rata Lama Sekolah 7. Cakupan beasiswa miskin 8. Regulasi tentang pengelolaan dan biaya pendidikan 9. Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen berkualifikasi pendidikan S1/D4	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan 3. Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-Laki 4. Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan 5. Angka Melek Huruf 6. Rata-Rata Lama Sekolah 7. Cakupan beasiswa miskin 8. Regulasi tentang pengelolaan dan biaya pendidikan 9. Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen berkualifikasi pendidikan S1/D4	PK/LAKIP : 9 Indikator sama : 6 Indikator berbeda : 3 Perbedaan Indikator pada PK/LAKIP
4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal 2. Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal 3. Angka Putus Sekolah (APS) 4. Persentase Kelulusan 5. Lulusan yang Melanjutkan 6. Rasio Guru dengan Siswa (TK) 7. Kesesuaian guru sesuai dengan Kompetensi 8. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk perpustakaan 9. Sekolah menerapkan MPMB	1. Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal 2. Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal 3. Angka Putus Sekolah (APS) 4. Persentase Kelulusan 5. Lulusan yang Melanjutkan 6. Rasio Guru dengan Siswa (TK) 7. Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas TK 8. Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas SD 9. Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas SMP/MTs 10. Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas SMA 11. Sekolah menerapkan MPMB	1. Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Lokal 2. Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Lokal 3. Angka Putus Sekolah (APS) 4. Persentase Kelulusan 5. Lulusan yang Melanjutkan 6. Rasio Guru dengan Siswa (TK) 7. Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas TK 8. Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas SD 9. Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas SMP/MTs 10. Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas SMA 11. Sekolah menerapkan MPMB	Terdapat perbedaan jumlah indikator RPJMD : 9 PK/LAKIP : 11 Indikator sama : 7 Indikator berbeda : 6 Perbedaan Indikator pada RPJMD dan PK/LAKIP
5. Terwujudnya pendidikan yang terjangkau bagi SD hingga SMU secara bertahap	1. Persentase kenaikan beasiswa bagi siswa miskin 2. Tersusunnya Regulasi tentang biaya pendidikan	Tidak muncul	Tidak muncul	Indikator RPJMD tidak muncul dalam PK/LAKIP

Lampiran 1

**IDENTIFIKASI KESELARASAN
INDIKATOR KINERJA RPJMD, PERJANJIAN KINERJA, DAN LAKIP
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
	RPJMD 2010-2015	PERJANJIAN KINERJA 2015	LAKIP 2015	
6. Meningkatnya kreativitas dan prestasi di bidang seni, budaya, kepemudaan dan olahraga	1. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga 2. Peningkatan jumlah dan kegiatan kepemudaan	1. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga	1. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga	Terdapat perbedaan jumlah indikator RPJMD : 2 PK/LAKIP : 1 Indikator sama : 1 Indikator berbeda : 1 Perbedaan Indikator pada RPJMD
7. Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Turunnya angka kemiskinan	1. Turunnya angka kemiskinan	1. Turunnya angka kemiskinan	Tidak terdapat perbedaan indikator
8. Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Persentase Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	1. Persentase Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	1. Persentase Proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	Tidak terdapat perbedaan indikator
9. Meningkatnya rasio siswa, angkatan kerja, dan rasio melek huruf perempuan/laki-laki	1. Kenaikan <i>Gender Development Index (GDI)</i>	1. Kenaikan <i>Gender Development Index (GDI)</i>	1. Kenaikan <i>Gender Development Index (GDI)</i>	Tidak terdapat perbedaan indikator
10. Meningkatnya penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan 2. Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak 3. Tersusunnya regulasi daerah tentang sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan paduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu 2. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 3. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan paduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu 2. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 3. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	terdapat perbedaan indikator antara RPJMD dan PK/LAKIP
11. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah keagamaan	Tidak muncul	Tidak muncul	Indikator RPJMD tidak muncul dalam PK/LAKIP
12. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat	1. Meningkatnya frekuensi fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan	Tidak muncul	Tidak muncul	Indikator RPJMD tidak muncul dalam PK/LAKIP
JUMLAH INDIKATOR MISI II	51 INDIKATOR	56 INDIKATOR	56 INDIKATOR	Total 163 indikator 136 indikator sama 27 indikator berbeda

**IDENTIFIKASI KESELARASAN
INDIKATOR KINERJA RPJMD, PERJANJIAN KINERJA, DAN LAKIP
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
	RPJMD 2010-2015	PERJANJIAN KINERJA 2015	LAKIP 2015	
C. MISI KETIGA 1. Meningkatnya kualitas dan Kuantitas produksi pertanian	1. Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian 2. Tingkat penggunaan teknologi tepat guna 3. Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan 4. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	1. Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian 2. Tingkat penggunaan teknologi tepat guna 3. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat 4. Ketersediaan energi dan protein per kapita 5. Penguatan cadangan pangan 6. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 7. Stabilitas harga dan pasokan pangan 8. Pencapaian skor pola pangan harapan 9. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 10. Penanganan daerah rawan pangan	1. Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian 2. Tingkat penggunaan teknologi tepat guna 3. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat 4. Ketersediaan energi dan protein per kapita 5. Penguatan cadangan pangan 6. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 7. Stabilitas harga dan pasokan pangan 8. Pencapaian skor pola pangan harapan 9. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 10. Penanganan daerah rawan pangan	Terdapat perbedaan jumlah indikator RPJMD : 4 PK/LAKIP : 10 Indikator sama : 3 Indikator berbeda : 8 Perbedaan Indikator pada RPJMD dan PK/LAKIP
2. Meningkatnya efektivitas kelembagaan pangan	1. Tingkat perkembangan kelompok tani	Tidak muncul	Tidak muncul	Indikator RPJMD tidak muncul dalam PK/LAKIP
3. Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM terhadap kesejahteraan masy	1. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor Industri	Tidak muncul	Tidak muncul	Indikator RPJMD tidak muncul dalam PK/LAKIP
4. Mengembangkan dan meningkatkan daya jual potensi wisata	1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Tidak terdapat perbedaan indikator
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkesinambungan	1. Ketersedian Jaringan Jalan dan jembatan 2. Prasarana Jalan dengan kondisi baik 3. Prasarana Jembatan dengan kondisi baik 4. Persentase Sarana Perhubungan dengan kondisi baik 5. Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air 6. Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan 7. Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	1. Ketersedian Jaringan Jalan 2. Ketersedian Jaringan Jembatan 3. Prasarana Jalan dengan kondisi baik 4. Prasarana Jembatan dengan kondisi baik 5. Persentase Sarana Perhubungan dengan kondisi baik 6. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	1. Ketersedian Jaringan Jalan 2. Ketersedian Jaringan Jembatan 3. Prasarana Jalan dengan kondisi baik 4. Prasarana Jembatan dengan kondisi baik 5. Persentase Sarana Perhubungan dengan kondisi baik 6. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	Terdapat perbedaan jumlah indikator RPJMD : 7 PK/LAKIP : 14 Indikator sama : 6 Indikator berbeda : 9 Perbedaan Indikator pada RPJMD dan PK/LAKIP

Lampiran 1

**IDENTIFIKASI KESELARASAN
INDIKATOR KINERJA RPJMD, PERJANJIAN KINERJA, DAN LAKIP
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			K.E.T.
	RPJMD 2010-2015	PERJANJIAN KINERJA 2015	LAKIP 2015	
		7. Tersedianya angkutan umum melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah erkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten 8. Tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 9. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 10. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan <i>guardrill</i>) dan enerangan jalan umum pada jalan kabupaten 11. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji 12. Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air 13. Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan 14. Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	7. Tersedianya angkutan umum melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah erkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten 8. Tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 9. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 10. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan <i>guardrill</i>) dan enerangan jalan umum pada jalan kabupaten 11. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji 12. Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air 13. Cakupan Jaringan Listrik Perdesaan 14. Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi baik	
6. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	1. Persentase Rasio Sampah terangkut dengan produksi sampah 2. Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal 3. Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup 4. Tersusunnya Perda Lingkungan Hidup	1. Persentase Rasio Sampah terangkut dengan produksi sampah 2. Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal 3. Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Persentase Rasio Sampah terangkut dengan produksi sampah 2. Persentase Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal 3. Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup	Terdapat perbedaan jumlah indikator RPJMD : 4 PK/LAKIP : 3 Indikator sama : 3 Indikator berbeda : 1 Perbedaan Indikator pada RPJMD
7. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan	1. Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang	Tidak muncul	Tidak muncul	Indikator RPJMD tidak muncul dalam

Lampiran 1

**IDENTIFIKASI KESELARASAN
INDIKATOR KINERJA RPJMD, PERJANJIAN KINERJA, DAN LAKIP
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			KET.
	RPJMD 2010-2015	PERJANJIAN KINERJA 2015	LAKIP 2015	
pertanahan	Wilayah 2. Tingkat Kesesuaian Lahan dengan RUTR			PK/LAKIP
8. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	1. Persentase Rumah Layak Huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	Tidak terdapat perbedaan indikator
JUMLAH INDIKATOR MISI III	21 INDIKATOR	29 INDIKATOR	29 INDIKATOR	Total 79 indikator 57 indikator sama 22 indikator berbeda
D. MISI KEEMPAT		Tidak muncul	Tidak muncul	Indikator RPJMD tidak muncul dalam PK/LAKIP
1. Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah	1. Jumlah kerjasama antar daerah			
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan	1. Angka Pertumbuhan Ekonomi 2. Angka Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Index Gini)	1. Angka Pertumbuhan Ekonomi	1. Angka Pertumbuhan Ekonomi	Terdapat perbedaan jumlah indikator RPJMD : 2 PK/LAKIP : 1 Indikator sama: 1 Indikator berbeda : 1 Perbedaan Indikator pada RPJMD
3. Meningkatnya pendapatan Masyarakat	1. PDRB per kapita	1. PDRB per kapita	1. PDRB per kapita	Tidak terdapat perbedaan indikator
4. Meningkatnya pemasaran produksi barang dan jasa	1. Persentase Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran	Tidak muncul	Tidak muncul	Indikator RPJMD tidak muncul dalam PK/LAKIP
5. Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan kawasan	1. Jumlah Klaster yang terbentuk	Tidak muncul	Tidak muncul	Indikator RPJMD tidak muncul dalam PK/LAKIP
6. Meningkatnya nilai investasi pembangunan	1. Peningkatan jumlah dan nilai investasi	1. Peningkatan jumlah dan nilai investasi	1. Peningkatan jumlah dan nilai investasi	Tidak terdapat perbedaan indikator
7. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1. Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja 2. Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	1. Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja 2. Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	1. Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja 2. Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Tidak terdapat perbedaan indikator
8. Meningkatnya fungsi Balai Latihan Kerja	1. Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja/kewirausahaan di Balai Latihan Kerja	1. Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja/kewirausahaan di Balai Latihan Kerja	1. Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja/kewirausahaan di Balai Latihan Kerja	Tidak terdapat perbedaan indikator
JUMLAH INDIKATOR MISI IV	10 INDIKATOR	6 INDIKATOR	6 INDIKATOR	Total 22 indikator 18 indikator sama 4 indikator berbeda

Lampiran 2

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur	1. Persentase tingkat pendidikan aparat	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah PNS Kabupaten Kebumen berdasarkan tingkat pendidikan dan diperbandingkan dengan total jumlah PNS, pada tahun bersangkutan.	Kuantitas Upaya
		2. Persentase jumlah aparat yang mengikuti diklat	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah PNS Kabupaten Kebumen yang telah mengikuti Diklat teknis yang diselenggarakan pemerintah (Daerah/Pusat) dan diperbandingkan dengan total jumlah PNS, pada tahun bersangkutan.	Kualitas Upaya
		3. Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin pegawai	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui prosentase jumlah penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS Kabupaten Kebumen dengan cara memperbandingkan jumlah pelanggaran disiplin PNS Kabupaten Kebumen pada tahun bersangkutan dan diperbandingkan	Kualitas Upaya

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
			dengan jumlah pelanggaran disiplin PNS Kabupaten Kebumen tahun lalu.	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Persentase SKPD yang menyusun LAKIP/LkjIP	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui prosentase jumlah SKPD yang menyusun LAKIP/LkjIP dengan cara membandingkan jumlah SKPD yang menyusun LAKIP/LkjIP pada tahun bersangkutan dan diperbandingkan dengan total jumlah SKPD.	Kualitas Upaya
		2. Persentase SKPD dengan predikat akuntabilitas terbaik	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui prosentase SKPD dengan predikat akuntabilitas terbaik dengan cara membandingkan jumlah SKPD dengan predikat akuntabilitas terbaik pada tahun bersangkutan dan diperbandingkan dengan total jumlah SKPD.	Kualitas Upaya
3	Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi kebijakan publik	1. Tersusunnya revisi regulasi daerah tentang keterbukaan informasi publik	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui progres revisi regulasi daerah tentang keterbukaan informasi publik.	Kuantitas Upaya
		2. Ketersediaan data dan informasi pemerintahan dan	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pemohon	Kuantitas Upaya

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
		pembangunan yang akurat	informasi publik yang masuk ke bagian Humas dan Protokol, yang terpenuhi permohonan informasinya.	
		3. Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pemohon informasi publik sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.	Kuantitas Upaya
		4. Jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui Jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	Kuantitas Upaya
4	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1. Persentase SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui prosentase jumlah SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM dengan cara membandingkan jumlah SKPD yang memiliki dan menerapkan SPM pada tahun bersangkutan dan diperbandingkan dengan total jumlah SKPD.	Kualitas Upaya
		2. Penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan upaya penanganan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik	Kualitas Upaya
		3. Tertib administrasi	Indikator ini bertujuan untuk	Kuantitas Upaya

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
		kependudukan (diberlakukan NIK)	mengetahui jumlah penduduk yang telah diberikan NIK	
		4. Cakupan penerbitan kartu keluarga	Indikator ini untuk mengetahui jumlah penduduk yang telah terlayani dalam penerbitan Kartu Keluarga dan diperbandingkan dengan total jumlah penduduk yang menjadi sasarannya.	Kualitas Upaya
		5. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	Indikator ini untuk mengetahui jumlah penduduk yang telah terlayani dalam penerbitan kartu tanda penduduk dan diperbandingkan dengan total jumlah penduduk yang menjadi sasarannya.	Kualitas Upaya
		6. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	Indikator ini untuk mengetahui jumlah penduduk yang telah terlayani dalam penerbitan kutipan akta kelahiran dan diperbandingkan dengan total jumlah penduduk yang menjadi sasarannya.	Kualitas Upaya
		7. Penyusunan struktur organisasi tata kerja Pemkab Kebumen	Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyusunan perda tentang struktur organisasi tata kerja Pemkab Kebumen	Kuantitas Upaya
		8. Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan Desa	Indikator ini untuk mengukur jumlah pelatihan aparatur pemerintahan desa	Kuantitas Upaya

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
		9. Meningkatnya persentase desa berkembang	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui prosentase jumlah desa berkembang dengan cara memperbandingkan desa berkembang pada tahun bersangkutan dengan jumlah keseluruhan desa yang masuk kategori berkembang Kabupaten Kebumen tahun lalu.	Kualitas Upaya
5	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1. Persentase kenaikan PAD	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui persentase kenaikan PAD dengan cara memperbandingkan jumlah PAD pada tahun bersangkutan dengan jumlah PAD Kabupaten Kebumen tahun lalu.	Kualitas Upaya
		2. Persentase tertib administrasi keuangan daerah	Indikator ini untuk mengetahui jumlah SKPD yang tertib administrasi keuangan daerah	Kuantitas Upaya
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung	Indikator ini untuk mengetahui Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung, yakni jumlah pemilih yang mendatangi TPS dibanding jumlah pemilih yang terdaftar	Kuantitas Hasil
		2. Tingkat partisipasi	Indikator ini untuk mengetahui	Kuantitas Hasil

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
		masyarakat dalam pilkades	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkades	
7	Meningkatnya kesiapan pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dengan segala dampaknya	1. Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana alam	Indikator ini untuk mengetahui Tingkat pelayanan penanggulangan bencana alam, yakni dengan membandingkan hasil kinerja tahun berlangsung dengan tahun sebelumnya	Kualitas Upaya
		2. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Indikator ini untuk tingkat jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, yakni dengan membandingkan aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dengan total aparatur pemadam kebakaran	Kualitas Upaya
		3. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	Indikator ini untuk mengetahui Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	Kuantitas Upaya
		4. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten	Indikator ini untuk mengukur tingkat penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten	Kualitas Upaya
		5. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan	Indikator ini untuk mengukur tingkat Cakupan patroli siaga ketertiban	Kualitas Upaya

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN			
1	2	3	4	5			
		ketentraman masyarakat	umum dan ketentraman masyarakat				
		6. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten	Indikator ini untuk mengukur tingkat rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten	Kualitas Upaya			
JUMLAH INDIKATOR				10	16	2	0
1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1. Usia harapan hidup	Indikator ini untuk mengukur tingkat usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Kebumen yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya yakni kecukupan gizi, angka kematian ibu, angka kematian bayi	Kuantitas Hasil			
		2. Mengurangi tingkat kematian anak	Indikator ini untuk mengukur pengurangan tingkat kematian anak di Kabupaten Kebumen yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kuantitas Hasil			
		3. Mengurangi angka kematian balita	Indikator ini untuk mengukur pengurangan tingkat kematian balita di Kabupaten Kebumen yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kuantitas Hasil			
		4. Meningkatkan kesehatan ibu/angka kematian ibu melahirkan	Indikator ini untuk mengukur peningkatan tingkat kematian ibu melahirkan Kabupaten Kebumen yang	Kuantitas Hasil			

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
			dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	
		5. Penanganan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya	Indikator ini untuk mengukur pengurangan tingkat kematian balita di Kabupaten Kebumen yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Upaya
		6. Cakupan kunjungan ibu hamil	Indikator ini untuk mengukur Cakupan kunjungan ibu hamil di Kabupaten Kebumen	Kualitas Upaya
		7. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Indikator ini untuk mengukur Cakupan kunjungan ibu hamil di Kabupaten Kebumen	Kualitas Upaya
		8. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Indikator ini untuk mengukur Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Kualitas Upaya
		9. Cakupan pelayanan nifas	Indikator ini untuk mengukur Cakupan pelayanan nifas	Kualitas Upaya
		10. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	Indikator ini untuk mengukur Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	Kualitas Upaya
		11. Cakupan kunjungan bayi	Indikator ini untuk mengukur	Kualitas Upaya

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
			Cakupan kunjungan bayi	
		12. Cakupan desa/keluahan UCI (<i>universal child imunization</i>)	Indikator ini untuk mengukur Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Kualitas Upaya
		13. Cakupan pelayanan anak balita	Indikator ini untuk mengukur Cakupan pelayanan anak balita	Kualitas Upaya
		14. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI usia 6-24 bulan bagi keluarga miskin	Indikator ini untuk mengukur tingkat cakupan pemberian makanan pendamping ASI usia 6-24 bulan bagi keluarga miskin	Kualitas Upaya
		15. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Indikator ini untuk mengukur tingkat cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Kualitas Upaya
		16. Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD	Indikator ini untuk mengukur tingkat cakupan penjarangan kesehatan siswa SD	Kualitas Upaya
		17. Cakupan peserta KB aktif	Indikator ini untuk mengukur tingkat cakupan peserta KB aktif	Kualitas Upaya
		18. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi	Indikator ini untuk mengukur tingkat cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi	Kualitas Upaya
		19. Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Indikator ini untuk mengukur tingkat cakupan PUS yang istrinya dibawah	Kualitas Upaya

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
			usia 20 tahun	
		20. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Indikator ini untuk mengukur tingkat cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Kualitas Upaya
		21. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	Indikator ini untuk mengukur tingkat penemuan dan penanganan penderita penyakit	Kualitas Upaya
		22. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Indikator ini untuk mengukur tingkat pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Kualitas Upaya
		23. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Indikator ini untuk mengukur tingkat capaian pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Kualitas Upaya
		24. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan	Indikator ini untuk mengukur tingkat pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan	Kualitas Upaya
		25. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Indikator ini untuk mengukur tingkat Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Kualitas Upaya
		26. Cakupan desa siaga aktif	Indikator ini untuk mengukur tingkat Cakupan desa siaga aktif	Kualitas Upaya
2	Terwujudnyapelayanan	1. Persentase cakupan	Indikator ini untuk mengukur tingkat	Kualitas Upaya

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN	
1	2	3	4	5	
	kesehatan dasar dan rujukan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat miskin secara bertahap		1. pelayanan Jamkesda	Persentase cakupan pelayanan Jamkesda	Kualitas Upaya
		2.	Persentase cakupan KK miskin peserta Jamkesmas/Jamkesda	Indikator ini untuk mengukur tingkat Persentase cakupan KK miskin peserta Jamkesmas/Jamkesda	
		3.	Pembangunan gedung rumah sakit umum daerah tipe B Kabupaten Kebumen	Indikator ini untuk mengukur tingkat capaian pembangunan gedung rumah sakit umum daerah tipe B Kabupaten Kebumen	
3	Terlaksananya pendidikan untuk semua	1.	Angka partisipasi kasar laki-laki	Indikator ini untuk mengukur Angka partisipasi kasar laki-laki di Kabupaten Kebumen, dari tingkat PAUD s.d SMA yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil
		2.	Angka partisipasi kasar perempuan	Indikator ini untuk mengukur Angka partisipasi kasar perempuan di Kabupaten Kebumen, dari tingkat PAUD s.d SMA yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil
		3.	Angka partisipasi murni laki-laki	Indikator ini untuk mengukur Angka partisipasi murni laki-laki di Kabupaten Kebumen, dari tingkat SD s.d SMA yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
		4. Angka partisipasi murni perempuan	Indikator ini untuk mengukur Angka partisipasi murni perempuan di Kabupaten Kebumen, dari tingkat SD s.d SMA yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil
		5. Angka melek huruf	Indikator ini untuk mengukur Angka melek huruf di Kabupaten Kebumen, yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil
		6. Rata-rata lama sekolah	Indikator ini untuk mengukur Rata-rata lama sekolah	Kuantitas Hasil
		7. Cakupan beasiswa miskin	Indikator ini untuk mengukur Cakupan beasiswa miskin	Kualitas Upaya
		8. Regulasi tentang pengelolaan dan biaya pendidikan	Indikator ini untuk mengukur keberadaan Regulasi tentang pengelolaan dan biaya pendidikan	Kuantitas Upaya
		9. Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen, berkualifikasi S1/D4	Indikator ini untuk mengukur tingkat Pendidik pada PAUD, Dikdas, Dikmen berkualifikasi pendidikan S1/D4 pada tingkat PAUD s.d SMA, yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kuantitas Hasil
4	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Ketersediaan kurikulum nasional dan lokal	Indikator ini untuk mengukur Ketersediaan kurikulum nasional dan	Kualitas Upaya

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
			lokal SD dan SMP yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	
		2. Keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal	Indikator ini untuk mengukur Keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal SD dan SMP yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil
		3. Angka putus sekolah	Indikator ini untuk mengukur tingkat Angka putus sekolah SD s.d SMA yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil
		4. Persentase kelulusan	Indikator ini untuk mengukur tingkat Persentase kelulusan SD s.d SMA yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil
		5. Lulusan yang melanjutkan	Indikator ini untuk mengukur tingkat Lulusan yang melanjutkan SD dan SMP yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil
		6. Prosentase guru layak mengajar SMP/MTs	Indikator ini untuk mengukur jumlah prosentase guru layak mengajar SMP/MTs	Kualitas Upaya
		7. Rasio guru dengan siswa	Indikator ini untuk mengukur jumlah rasio guru dengan siswa SD s.d SMA	Kualitas Upaya

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN	
1	2	3	4	5	
		8.	Persentase guru layak mengajar SD/MI	Indikator ini untuk mengukur jumlah Persentase guru layak mengajar SD/MI	Kualitas Upaya
		9.	Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas TK	Indikator ini untuk mengukur kelayakan Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas TK	Kuantitas Upaya
		10.	Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas SD	Indikator ini untuk mengukur kelayakan Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas SD	Kuantitas Upaya
		11.	Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas SMP/MTs	Indikator ini untuk mengukur kelayakan Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas SMP/MTs	Kuantitas Upaya
		12.	Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas SMA/SMK sederajat	Indikator ini untuk mengukur kelayakan Sarana dan prasarana kondisi ruangan kelas SMA/SMK	Kuantitas Upaya
		13.	Sekolah menerapkan MPMBS	Indikator ini untuk mengukur Sekolah menerapkan MPMBS	Kuantitas Hasil
		14.	Peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga	Indikator ini untuk mengukur peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil
5	Menurunnya angka kemiskinan	1. Menurunnya angka kemiskinan	Indikator ini untuk mengukur penurunan angka kemiskinan yang	Kualitas Hasil	

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3		4	5
				dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial	1.	Persentase proporsi penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap jumlah penduduk	Indikator ini untuk mengukur Persentase proporsi penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil
7	Meningkatnya rasio siswa, angkatan kerja, dan rasio melek huruf perempuan/laki-laki	1.	Kenaikan <i>gender development index (GDI)</i>	Indikator ini untuk mengukur peningkatan <i>gender development index (GDI)</i> yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil
8	Meningkatnya penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan penaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	Indikator ini untuk mengukur Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan penaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	Kualitas Upaya
		2.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Indikator ini untuk mengukur Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Kualitas Upaya

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN			
1	2	3	4	5			
		3. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Indikator ini untuk mengukur Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kualitas Upaya			
		4. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Indikator ini untuk mengukur Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Kualitas Upaya			
		JUMLAH INDIKATOR		6	33	9	12
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian	1. Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian	Indikator ini untuk mengukur Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil			
		2. Tingkat penggunaan teknologi tepat guna	Indikator ini untuk mengukur Tingkat penggunaan teknologi tepat guna	Kualitas Upaya			
		3. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Indikator ini untuk mengukur Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil			
		4. Tingkat ketersediaan energi dan protein per kapita	Indikator ini untuk mengukur Tingkat ketersediaan energi dan protein per	Kualitas Hasil			

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
			kapita yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	
		5. Penguatan cadangan pangan	Indikator ini untuk mengukur Penguatan cadangan pangan yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil
		6. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Indikator ini untuk mengukur Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Kuantitas Hasil
		7. Stabilitas harga dan pasokan pangan	Indikator ini untuk mengukur Stabilitas harga dan pasokan pangan yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil
		8. Pencapaian skor pola pangan harapan	Indikator ini untuk mengukur Pencapaian skor pola pangan harapan yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kuantitas Hasil
		9. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Indikator ini untuk mengukur Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kuantitas Hasil
		10. Penanganan daerah rawan pangan	Indikator ini untuk mengukur Penanganan daerah rawan pangan yang dipengaruhi oleh pencapaian	Kuantitas Hasil

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
			indikator lainnya	
2	Mengembangkan dan daya jual potensi wisata	1. Kontribusi pariwisata terhadap PAD	Indikator ini untuk mengukur jumlah Kontribusi pariwisata terhadap PAD	Kuantitas Upaya
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkesinambungan	1. Ketersediaan jaringan jalan	Indikator ini untuk mengukur jumlah panjang jalan	Kuantitas Upaya
		2. Ketersediaan jaringan jembatan	Indikator ini untuk mengukur jumlah jaringan jembatan	Kuantitas Upaya
		3. Prasarana jalan dengan kondisi baik	Indikator ini untuk mengukur jumlah Prasarana jalan dengan kondisi baik	Kualitas Upaya
		4. Prasarana jembatan dengan kondisi baik	Indikator ini untuk mengukur jumlah Prasarana jembatan dengan kondisi baik	Kualitas Upaya
		5. Persentase sarana perhubungan dengan kondisi baik	Indikator ini untuk mengukur jumlah sarana perhubungan dengan kondisi baik	Kualitas Upaya
		6. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	Indikator ini untuk mengukur jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	Kualitas Hasil
		7. Tersedianya angkutan umum melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil	Indikator ini untuk mengukur angkutan umum melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan	Kualitas Hasil

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN
1	2	3	4	5
		dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten	wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten	
		8. Tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Indikator ini untuk mengukur jumlah halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Kuantitas Upaya
		9. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Indikator ini untuk mengukur jumlah terminal pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Kuantitas Upaya
		10. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan <i>guardrill</i>) dan enerangan jalan umum pada jalan kabupaten	Indikator ini untuk mengukur jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan <i>guardrill</i>) dan enerangan jalan umum pada jalan kabupaten	Kuantitas Upaya
		11. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	Indikator ini untuk mengukur jumlah unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	Kuantitas Upaya

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN			
1	2	3		4	5			
		12.	Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Indikator ini untuk mengukur tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Kuantitas Hasil			
		13.	Cakupan jaringan listrik perdesaan	Indikator ini untuk Cakupan jaringan listrik perdesaan	Kuantitas Hasil			
		14.	Proporsi jaringan irigasi dengan kondisi air	Indikator ini untuk mengukur tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Kuantitas Hasil			
4	Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	1.	Persentase rasio sampah terangkut dengan produksi sampah	Indikator ini untuk persentase rasio sampah terangkut dengan produksi sampah	Kuantitas Hasil			
		2.	Persentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal	Indikator ini untuk mengukur tingkat Persentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL dan Amdal	Kuantitas Hasil			
		3.	Penurunan kasus pencemaran lingkungan hidup	Indikator ini untuk mengukur tingkat Penurunan kasus pencemaran lingkungan hidup	Kualitas Upaya			
5	Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman	1	Persentase rumah layak huni	Indikator ini untuk mengukur Persentase rumah layak huni	Kuantitas Hasil			
JUMLAH INDIKATOR					6	5	10	7
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan	1.	Angka pertumbuhan ekonomi	Indikator ini untuk mengukur Angka pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator	Kualitas Hasil			

**IDENTIFIKASI INDIKATOR KINERJA LAKIP MENGGUNAKAN ANALISIS EMPAT KUADRAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		DESKRIPSI INDIKATOR	KATEGORI INDIKATOR DALAM KUADRAN FRIEDMAN			
1	2	3		4	5			
	pemerataan			lainnya				
2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.	PDRB per kapita	Indikator ini untuk mengukur PDRB per kapita yang dipengaruhi oleh pencapaian indikator lainnya	Kualitas Hasil			
3	Meningkatnya nilai investasi pembangunan	1.	Peningkatan jumlah dan nilai investasi	Indikator ini untuk mengukur Peningkatan jumlah dan nilai investasi	Kuantitas Hasil			
4	Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1.	Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	Indikator ini untuk mengukur Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	Kuantitas Hasil			
		2.	Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Indikator ini untuk mengukur Tersusunnya regulasi daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Kuantitas Upaya			
5	Meningkatnya fungsi balai latihan kerja	1.	Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja/kewirausahaan di balai latihan kerja	Indikator ini untuk mengukur Persentase kenaikan jumlah peserta pelatihan kerja/kewirausahaan di balai latihan kerja	Kualitas Upaya			
		JUMLAH INDIKATOR			1	1	2	2
		TOTAL INDIKATOR			23	55	23	21

